

**ARAH BARU GERAKAN FEMINISME DI TUNISIA DAN
POLITIK IDENTITAS POS-ARAB SPRING
TAHUN 2011-2015**



Oleh:

AYU MAULIDA ALKHOLID
NIM: 20200011035

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian
Timur Tengah

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ayu Maulida Alkholid

NIM : 20200011035

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Maulida
Ayu Maulida Alkholid, S.Hum.
NIM. 20200011035

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Maulida Alkholid
NIM : 20200011035
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Ayu Maulida Alkholid, S.Hum.
NIM. 20200011035



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-724/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : Arah Baru Gerakan Feminisme di Tunisia dan Politik Identitas Post-Arab Spring Tahun 2011-2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU MAULIDA ALKHOLID, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011035
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63073627c7b0e

Ketua Sidang/Penguji I

Najib Kailani, S.Fil.L., M.A., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6306d537d54e1

Penguji II

Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
SIGNED



Valid ID: 63081de18de66

Penguji III

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED



Valid ID: 630830950e279

Yogyakarta, 23 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **ARAH BARU GERAKAN FEMINISME DI TUNISIA DAN POLITIK IDENTITAS POST-ARAB SPRING TAHUN 2011-2015**
Yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Maulida Alkholid, S.Hum
NIM : 20200011035
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (MA).

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
Pembimbing



Muhammad Yunus Masrukhin, Lc., MA., Ph.D

ABSTRAK

Gerakan feminisme di Tunisia mengalami perubahan dan transformasi yang signifikan post-Arab Spring. Hal ini menjadi momentum bagi Tunisia dalam proses revolusi maupun pasca revolusi. Situasi ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh para perempuan dan gerakan feminisme Tunisia untuk ikut serta dan terlibat dalam proses revolusi dan transisi pemerintahan. Jika sebelum Arab Spring pola gerakan feminisme lebih pada ideologi negara (state feminism), tetapi pasca Arab Spring lebih mengarah pada aktivisme gender. Kondisi ini mengindikasikan bahwa gerakan feminisme post-Arab Spring lebih partisipatif dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, politik identitas di Tunisia juga menguat post-Arab Spring. Proses transisi pemerintahan dan demokratisasi membuat negara tersebut harus mampu keluar dari berbagai persoalan politik. Kontestasi dan proses negosiasi antara kelompok Islamis vis-à-vis sekularis juga tidak dapat dihindarkan. Kedua kelompok tersebut saling berebut kekuasaan dan posisi politik dalam proses transisi pasca Arab Spring. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah, melacak dan memberikan perspektif yang baru dalam persoalan diskursus gerakan feminisme dan politik identitas Tunisia. Sementara itu, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan, yakni terkait bagaimana arah baru gerakan feminisme Tunisia pada masa post-Arab Spring, bagaimana konstelasi politik identitas di Tunisia post-Arab Spring, dan mengapa politik identitas dan upaya gerakan kelompok feminisme menguat post-Arab Spring dalam persoalan politik Tunisia. Dalam menganalisis bagaimana transformasi gerakan feminisme dan politik di Tunisia, peneliti menggunakan teori gerakan sosial. Tiga komponen utama dalam teori ini yakni, peluang politis (*political opportunity structure*), siklus penentangan (*cycle of contention*), dan pembingkaihan (*framing*).

Penelitian ini menemukan bahwa gerakan feminisme di Tunisia pada post-Arab Spring mengarah pada aktivisme gender atau peneliti dalam hal ini memilih menyebut dengan istilah “feminisme partisipatif”. Para perempuan ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan maupun merespon berbagai isu penting terkait isu perempuan, gender, dan hak asasi manusia. Selain itu, politik identitas sebelum dan pasca Arab Spring juga menjadi perdebatan dan persoalan serius bagi Tunisia, terutama di tengah proses transisi politik post-Arab Spring. Sehingga, antar kedua kelompok, baik Islamis dan sekularis berusaha berkontestasi dan bernegosiasi untuk mendapatkan tempat dan jabatan politik di pemerintahan.

Kata Kunci: Arab Spring, Feminisme, Gender, Identitas, Politik.

MOTTO

“Jangan pernah lelah belajar, selagi nafasmu masih ada”.

“Jadilah orang yang baik bagi semesta dan menebar manfaat bagi sesama”.

“Orang tidak akan pernah tahu siapa dirimu, jika kau tidak berkarya dan menulis”.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena penulisan tesis yang berjudul: **Arah Baru Gerakan Feminisme di Tunisia dan Politik Identitas Post-Arab Spring Tahun 2011-2015** dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal. Atas ridho dan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan lancartanpa halangan suatu apapun dan mendapatkan hal yang baru, baik berupa pengetahuan dan pengalaman selama melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Dr. Muhammad Yunus Masrukhin, Lc., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, saran, kritikan yang membangun, serta gagasan- gagasan berharga kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Atas kritikdan saran beliaulah tesis ini bisa lebih berbobot dan terselesaikan dengan baik, hingga meningkat dari level praksis ke akademis, sehingga penulis dapat segera menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Pak Najib Kailani, S.Fil., I., Ph.D dan Dr. Subi Nur Isnaini atas masukan, catatan, dan kritik yang membangun bagi tesis saya.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula yang paling penting penulis ucapkan terimakasih banyak kepada suami tercinta Mas Firmanda Taufiq yang selalu membersamai serta membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Selain itu, terimakasih juga untuk kedua anak manis, Ananda

M. Sabda Majlafaza Taufiq dan Mihrimah Sevda Taufiq yang menjadi penyemangatdan selalu menjadi penghibur di saat penulis mulai

lelah. Ucapan terimakasih penulis ucapkan juga kepada Abah dan Ibuk serta kedua mertua di rumah yang selalu melangitkan doa-doanya, memberikan dukungan, dan dorongan mental maupun material. Penulis mengakui penyusunan tesis ini tidak berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan studi Master dan tesis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan beasiswa dan *funding* selama studi ini, saya juga ucapkan terimakasih kepada teman-teman konsentrasi Kajian Timur Tengah (KTT), yakni Anna Zakiyah Derajat, Khotibul Umam, Annisa Isdiyanti, Nurfaumi, Idha Ismalia Rohmatika, dan Adnan Adwitama, atas kebersamaannya selama proses akademik. Semoga kita nantinya mampu berkontribusi secara akademik maupun memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta memberikan teladan yang bernilai positif bagi generasi berikutnya. Selain itu, kepada teman-teman seperjuangan awardee LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kebersamaannya selama ini dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelurahan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022



Ayu Maulida Alkholid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretis	20
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : ARAH BARU GERAKAN FEMINISME TUNISIA POST-ARAB SPRING	
A. Dinamika Gerakan Feminisme Post-Arab Spring di Tunisia.....	26
B. Transformasi Gerakan Feminisme di Tunisia	37
C. Feminisme Tunisia: Dari Ideologi Negara ke Aktivisme Gender	45
D. Kesimpulan.....	52
BAB III : GENEALOGI POLITIK IDENTITAS DAN	

TRANSISI POLITIK TUNISIA POST-ARAB SPRING

A. Akar Politik Identitas di Tunisia	55
B. Demokrasi dan Transisi Politik Tunisia	64
C. Tunisia Post-Arab Spring: Partai Ennahda dan Akomodasi Perempuan	72
D. Kesimpulan.....	79

BAB IV : POLITIK IDENTITAS DAN GERAKAN

FEMINISME DI TUNISIA DALAM PUSARAN

KEKUASAAN

A. Politik Identitas dan Hegemoni Kuasa di Tunisia	82
B. Feminisme Tunisia: Negosiasi antara Perjuangan Gender dan Kekuasaan.....	90
C. Mobilisasi Gerakan Perempuan dan Kontestasi Islamis vis-à-vis Sekuler	98
D. Kesimpulan.....	105

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA 112

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan keterlibatan perempuan dalam proses terjadinya revolusi Arab Spring terepresentasikan dalam beberapa aktivisme yang mereka lakukan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam aktivitas politik dan partisipasi di ruang publik. Gerakan feminisme Tunisia kaitannya dalam proses revolusi Arab Spring pada tahun 2011 menunjukkan bahwa mereka berusaha beraksi nyata dengan berbagai aktivitas dan ekspresi yang mampu dilakukan. Jiwa perlawanan yang termanifestasikan dalam diri perempuan berupaya terefleksikan dalam aktivitas politik. Selain itu, perempuan juga menggunakan media sosial dan teknologi informasi dalam memobilisasi massa terkait ruang publik di Tunisia. Di beberapa negara lainnya, seperti halnya Mesir, Libya, Yaman, dan Yordania juga melakukan hal yang sama dalam upaya menumbangkan rezim di negaranya masing-masing.²

Perempuan Tunisia sendiri menjadi salah satu fenomena dimana mereka turut ikut serta dalam memobilisasi massa dalam proses revolusi, baik melalui media sosial maupun turun ke jalan dalam rangka menyuarkan hak-hak mereka, terutama usaha

¹ Fatima Sadiqi (eds.), *Women's Movements in Post-"Arab Spring" North Africa*, 1st ed., Comparative Feminist Studies (Palgrave Macmillan US, 2016), 1-2.

² Ahmad R. Mardhatillah Umar et al., "Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena 'Arab Spring' dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, No. 2 (September 22, 2016): 114-29.

menumbangkan rezim Ben Ali yang dinilai otoriter dan korup.³ Sementara itu, perempuan kurang difasilitasi dalam urusan politik dan cenderung terpinggirkan. Oleh karena itu, ada pergeseran yang terjadi pada masa pra dan pasca revolusi Arab Spring, yakni dari aktivisme ideologi ke perjuangan gender. Artinya, perempuan tidak hanya berdiam diri, akan tetapi mereka juga berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi politik dan terwujudnya negara yang demokratis.

Dalam konteks tersebut, para aktivis perempuan dan gerakan feminisme di Tunisia memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi dan transformasi politik Tunisia. Mereka juga mampu masuk ke parlemen dan menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Bahkan, mereka juga terlibat dalam penyusunan kebijakan negara dalam urusan perempuan, kesetaraan gender, dan persoalan keadilan perempuan, serta hak asasi manusia. Dalam hal ini, perubahan pemikiran perempuan Tunisia sangat signifikan. Mereka telah berpikir maju dalam melihat zaman yang semakin berkembang dan situasi politik yang terus dinamis. Maka, mereka juga harus terlibat dan memainkan peran penting dalam upaya transformasi politik Tunisia yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Dalam pandangan Imen Yacoubi, hak-hak perempuan di Tunisia melampaui paradigma kedaulatan negara yang berfokus pada hukum yang dikaitkan dengan feminisme negara.⁴ Pemberontakan

³ Lisa Anderson, "Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences between Tunisia, Egypt, and Libya," *Foreign Affairs* 90 (2011): 2.

⁴ Imen Yacoubi, "Sovereignty from Below: State Feminism and Politics of Women Against Women in Tunisia," *The Arab Studies Journal* 24, No. 1 (2016): 254–74.

dan perlawanan yang dilakukan oleh para perempuan Tunisia dan mereka memiliki tiga sifat, yakni pertama, mengungkapkan pemahaman kritis tentang negara Tunisia, baik sebelum dan pasca revolusi Dunia Arab. Kedua, yakni feminisme yang berkomitmen pada klaim kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui non-pemerintah dan kolektif sipil. Ketiga, yakni para perempuan melakukan pemberontakan melalui kehidupan sehari-hari, aksi langsung, pendudukan ruang publik, dan beragam bentuk feminitas yang ekspresif.⁵

Jika dilacak dari tantangan dan peluang yang terjadi pada perempuan pos Arab Spring di Dunia Arab, ada berbagai pandangan baru terkait studi pemberdayaan perempuan pos Arab Spring, yakni lebih berfokus pada berbagai bentuk dan segi politik partisipatif.⁶ Shalaby dan Moghadam juga menyoroti tentang peran masyarakat sipil dan kekuatan sosial yang berbeda dalam mempromosikan isu gender di berbagai wilayah di Dunia Arab. Terlepas dari dampak struktural dan proses kelembagaan dalam mempromosikan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan persoalan terkait perempuan.

Lebih lanjut, untuk memahami dinamika hubungan antar wilayah di Dunia Arab, terutama terkait kondisi demokrasi yang dinilai lamban dan persoalan hak-hak perempuan. Para cendekiawan dan pemegang kebijakan, serta peneliti juga tengah mengkaji terkait diskursus tersebut. Ada salah satu kelompok ulama yang berpendapat bahwa hubungan antara demokrasi dan perempuan

⁵ Ibid, 254.

⁶ Marwa Shalaby and Valentine M. Moghadam (eds.), *Empowering Women after the Arab Spring*, 1st ed., Comparative Feminist Studies (Palgrave Macmillan US, 2016), 1-2.

tidak mudah didefinisikan. Tidak hanya itu, ketahanan suatu negara demokrasi memiliki dampak yang kuat dalam membentuk norma-norma patriarki di masyarakat. Berdasarkan pada pandangan ini mengungkap bahwa lambatnya demokrasi juga menimbulkan hak-hak perempuan di seluruh wilayah dapat dengan mudah dikaitkan dengan kurangnya tradisi demokrasi.⁷

Sementara dalam diskursus perempuan dan demokrasi pos Arab Spring di Dunia Arab mempertanyakan apakah demokrasi sesuai untuk perempuan. Hal ini juga membutuhkan jawaban dan penelusuran mendalam. Dalam hal ini, demokrasi dinilai sebagai sistem politik yang membuatnya paling cocok dan mampu dicapai kewarganegaraan terkait perempuan dan kesetaraan gender. Selanjutnya, mobilisasi yang terjadi dalam konteks transisi demokrasi juga mengarah pada pemberdayaan perempuan. Contoh lain dari proses demokratisasi, yakni adanya protes sosial massal yang mengarah ke perubahan politik besar, konstitusi baru, masyarakat sipil yang lebih kuat, dan demokratisasi yang terus menguat.

Dalam konteks Tunisia di bawah kuasa Ben Ali menjadi negara yang rentan terhadap kesewenang-wenangan atas perempuan dan tindak korupsi yang ia lakukan telah menambah daftar kebobrokan rezimnya. Upaya revolusi Arab Spring di Tunisia yang dipicu oleh pembakaran diri Mohammeda Bouazizi atas sikap pemerintah yang korup dan otoriter, serta situasi ekonomi Tunisia

⁷ Ibid, 7.

yang memburuk.⁸ Di sisi lain, pada awal pemerintahannya Ben Ali berusaha menerapkan sistem pemerintahan yang liberal. Dimana penegakan hak perempuan dan pembangunan sosial ekonomi menjadi prioritasnya. Namun, hal itu hanya sebagai kedok rezim yang mengatasnamakan demokrasi. Pembatasan ruang gerak aktivitas organisasi juga terjadi pada masa itu. Sebagai salah satu contohnya, *The Tunisian Human Right League* adalah organisasi yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Dalam pergerakannya, organisasi tersebut berada di bawah kendali pemerintah. Hal ini menjadikan melemahnya partisipasi aktivisme masyarakat sipil di Tunisia.⁹ Bahkan, banyak terjadinya pengangguran di Tunisia semakin membuat rakyat Tunisia merasa kesal dan menyulut kemarahan atas tindakan represif pemerintah kepada rakyatnya. Upaya menumbangkan rezim otoriter Ben Ali adalah langkah konkret untuk mengatasi problematika yang tengah dialami oleh Tunisia. Menguatnya Arab Spring di negara-negara Timur Tengah juga membuat Islam dalam gerakan sosial dan upaya demokratisasi semakin membesar dalam lanskap Timur Tengah.¹⁰

Selanjutnya, keterlibatan perempuan dalam konteks politik Tunisia dan identitas politik yang terepresentasikan pos Arab Spring juga menjadi kajian penting, terutama pada kurun waktu 2011-2015.

⁸ Ahmad Sahide et al., "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, No. 2 (2016): 118–29.

⁹ Muhammad Fakhry Ghafur, "Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya," *Jurnal Penelitian Politik* 11, No. 2 (April 11, 2016): 16.

¹⁰ Shafira Elnanda Yasmine, "Arab Spring: Islam dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 28, No. 2 (2015): 106–13.

Penelitian lebih berfokus pada rentang waktu tersebut, dimana pada masa ini terjadi proses transisi pemerintahan pasca revolusi. Pemerintah baru Tunisia masih terus berbenah dan menentukan bagaimana arah ke depan pasca revolusi. Hal ini untuk melihat secara intensif bagaimana kontribusi perempuan Tunisia dalam mempengaruhi wajah politik Tunisia dan kebijakan-kebijakan terkait kesetaraan gender, akomodir atas hak-hak perempuan, dan persoalan hak asasi manusia. Situasi ini pada akhirnya membuat perempuan terakomodir suara dan hak-haknya dalam konteks negara dan masyarakat. Selain itu, dalam konteks pos Arab Spring, perempuan memiliki dampak besar bagi perubahan politik dan terwakilinya suara dan pendapat para perempuan Tunisia terkait kesetaraan gender, persoalan Hak Asasi Manusia dan isu-isu yang menyangkut dengan persoalan perempuan Tunisia.¹¹

Dalam konteks historisnya, gerakan feminisme di Tunisia dapat dilacak paling tidak dalam proses revolusi Dunia Arab yang dimulai di negara tersebut. Lebih lanjut, untuk melihat dan menilai proses perjuangan perempuan Tunisia dapat dilihat dari transisi politik dan untuk melindungi hak-hak mereka, penting untuk mempertimbangkan latar belakang sejarah hak-hak perempuan di Tunisia. Lebih khusus, latar belakang dari sejarah terkait legislasi gender Tunisia dan janji partai baru Ennahda memainkan peran penting terkait hak perempuan, baik sebelum maupun pasca revolusi Dunia Arab.¹² Sementara mengenai gerakan feminisme di Tunisia

¹¹ Sadiqi (eds), *Women's Movements in Post- "Arab Spring" North Africa*, 223-225.

¹² Pelin Gönül Şahin. *Women's Liberties and Gender Equality in Tunisia: The Asthma of the Arab Spring?*," CIDOB, diakses pada 21 Desember 2021,

sebelum Arab Spring, yakni upaya perjuangan dalam kesetaraan gender dapat dibaca dari penelitian Amel Grami. Ia mengulas terkait bagaimana akar peran perintis Tunisia dalam berbagai isu perempuan dalam mencapai kembali ke awal kedua puluh. Dalam hal ini, Tahar Haddad, seorang sarjana progresif Zitouna yang menyerukan pembebasan perempuan dalam konteks ikatan tradisional mereka.¹³ Ia juga menulis buku berjudul “Our Women in the Shari’a and Society” yang diterbitkan pada tahun 1930. Dalam bukunya tersebut, Haddad menyerukan tentang pentingnya perempuan dalam masyarakat modern dan berkembang. Ia juga mengkaji posisi perempuan dalam masyarakat Tunisia yang menyandingkannya dengan hukum Islam. Menurut pandangan Haddad, pendidikan formal bagi perempuan adalah keharusan dan mempertahankan bahwa selama bertahun-tahun Islam telah disalahartikan, sehingga perempuan tidak menyadari tugas mereka dan keuntungan sah yang dapat mereka harapkan dalam hidup.

Lebih lanjut, Haddad mengecam segala bentuk pelecehan terhadap perempuan, seperti halnya penolakan terkait suami yang dapat menceraikan istrinya tanpa penjelasan. Dalam persoalan tersebut, Islam memperbolehkan, tetapi ada banyak yang menyangkal pernyataan hal itu. Menurutnya, agama tidak bersalah atas tuduhan tersebut yang menjadi penghalang jalan modernitas.¹⁴ Haddad juga menyerukan dukungan untuk perubahan sosial dan

http://www.cidob.org/en/publications/publication_series/monographs/monographs/women_s_liberties_and_gender_equality_in_tunisia_the_asthma_of_the_arab_spring.

¹³ Amel Grami, “Gender Equality in Tunisia,” *British Journal of Middle Eastern Studies* 35, No. 3 (2008): 349–61.

¹⁴ *Ibid*, 350.

penghormatan agama terhadap identitas. Perlu diketahui dalam sejarah perjalanan emansipasi perempuan Tunisia pada tahun 1936 melahirkan pembentukan organisasi perempuan pertama. Perempuan Tunisia juga berupaya memajukan tujuan mereka sendiri dengan signifikan dan memainkan peran aktif dalam perjuangan kemerdekaan negara merdeka yang terjadi pada tahun 1938. Dari peristiwa tersebut, para pemimpin partai Destour dan perempuan yang tergabung dalam aksi demonstrasi partai ditangkap.

Di lain pihak, Code of Personal Status (CPS) atau Kode Status Pribadi diadopsi pada 13 Agustus 1956. Keputusan tersebut terjadi pasca kemerdekaan Tunisia. CPS sendiri bukan tanggapan dari negara terhadap klaim dan tekanan perempuan, tetapi keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin politik dan reformis di perkotaan. Lebih lanjut, para aktivis perempuan Tunisia juga menekankan pada perlunya memisahkan agama dari negara sebagai upaya penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Mereka berkeyakinan bahwa usaha memajukan hak-hak perempuan adalah kunci gerbang kebebasan bagi perempuan dan perlindungan dari gerakan ekstremis, serta kemunduran yang terjadi.

Selanjutnya, gerakan feminisme Tunisia sendiri dapat ditelusuri dalam beberapa fase, yakni fase lahirnya gerakan feminisme pada tahun 1920-1956, *state feminism* pada tahun 1956-1970, dan munculnya gerakan feminis otonom.¹⁵ Dari konteks historisnya, gerakan awal feminisme Tunisia dimulai pada tahun

¹⁵ Khedija Arfaoui, "The Development of the Feminist Movement in Tunisia 1920s-2000s," *The International Journal of the Humanities: Annual Review* 4, No. 8 (2007): 53–60, 53.

1920. Selanjutnya, dunia pun terbagi menjadi dua, yakni lingkungan yang ramah bagi perempuan dan ruang publik bagi laki-laki. Berdasarkan konteksnya, perempuan Tunisia tidak hanya menjalani kehidupan yang terpencil, tetapi mereka juga memakai kerudung. Bahkan, hanya sebagian orang yang memiliki hak istimewa dan akses pendidikan oleh guru pribadi. Namun, gerakan nasionalis kemerdekaan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memasuki ruang publik. Mereka pun membentuk tiga gerakan penting, yakni sosialis, nasionalis, dan religius. Perempuan Tunisia dalam hal ini muncul ke depan umum untuk mendukung perjuangan kemerdekaan.

Lebih lanjut, kehidupan perempuan di Dunia Arab sangat tergantung dan diatur oleh hukum keluarga dan ditentang Habib Bourguiba dalam Kode Status Pribadi (CPS) pasca kemerdekaan tahun 1956. Ia menciptakan prinsip dasar, yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam kurun waktu tahun lima puluhan awal dan awal enam puluhan menjadi periode dengan gejolak internasional yang intens dalam persoalan hak-hak sipil dan kebebasan. Bourguiba juga mengambil keputusan besar lainnya, yakni membuat tiga gerakan utama yang tergabung dalam Persatuan Perempuan Nasional atau The National Union of Tunisian Women (UNFT).

Sementara itu, generasi baru gerakan feminisme muncul ke permukaan. Mereka juga mendapatkan akses yang baik dalam hal pendidikan. Bahkan, banyak dari perempuan tersebut lebih progresif. Pada masa Ben Ali muncul dua organisasi feminis, yakni

AFTURD¹⁶ dan AFTD¹⁷. Selain itu, pada tahun 1982, Tunisia menjadi tuan rumah UNESCO dalam pertemuan ahli penelitian multidisiplin mengenai perempuan di Dunia Arab. Di lain pihak, salah satu faktor yang menyebabkan mobilisasi perempuan adalah bangkitnya fundamentalisme di Dunia Arab.

Akhirnya, Tunisia memasuki fase Arab Spring, dimana situasi politik yang tidak menentu membuat gerakan feminisme pun mencuat. Mereka terlibat dalam upaya mobilisasi atas apa yang terjadi dalam politik Tunisia yang memanas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gerakan-gerakan perempuan dalam berbagai aksinya, baik melalui media sosial maupun aksi demonstrasi menuntut turunnya Ben Ali dari kekuasaannya.¹⁸ Sementara pada masa post-Arab Spring, persoalan mengenai hak-hak perempuan dan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam membangun kembali negara mereka dan membentuk kembali masa depan. Hal ini juga dialami oleh gerakan feminisme di Tunisia. Aktivitas yang dilakukan oleh perempuan Arab baik secara online dan offline yang produktif dalam memberikan kontribusi bagi sejarah feminisme di Dunia Arab.

¹⁶ Association of Tunisian Women for Research and Development (AFTURD) merupakan suatu organisasi yang didalamnya menyatukan para peneliti perempuan yang tertarik dengan penelitian aktivis tentang perempuan. Para anggotanya berupaya mempromosikan mengenai refleksi kritis dan konstruktif dalam masalah status perempuan Tunisia, termasuk budaya, sosial, ekonomi dan politik.

¹⁷ Tunisian Association of The Democratic Women (AFTD) adalah organisasi perempuan yang berdiri sejak 1 Mei 2004. Organisasi ini bergerak dalam bidang hak perempuan, migrasi dan pengungsi, pendidikan HAM, hak ekonomi dan sosial, reformasi Arab, keadilan, kebebasan berserikat dan berbicara. Aktivitas utama mereka adalah menjadi tempat perlindungan bagi perempuan-perempuan yang terancam serta aktif mengkampanyekan tentang kesetaraan sukseksi.

¹⁸ Glenda Garelli and Martina Tazzioli, *Tunisia as a Revolutionized Space of Migration* (New York: Palgrave Macmillan US, 2017), 70.

Lebih lanjut, politik identitas Tunisia juga menguat di tengah munculnya gerakan feminisme yang terus dinamis dan berkembang. Apalagi post-Arab Spring, Tunisia masih mencari formula yang tepat untuk melakukan restrukturisasi pemerintahan, termasuk masih dihadapkan pada persoalan dalam negeri yang belum selesai. Untuk itu, politik identitas yang menguat adalah kelompok Islamisme yang berupaya mengambil peran besar dalam transisi pemerintahan. Dalam hal ini, partai An-Nahdlah memiliki peran dan kontribusi penting mengisi kekosongan kekuasaan post-Arab Spring karena Ben Ali sudah jatuh dari kekuasaannya.¹⁹ Mobilisasi partai Islam dalam proses transisi dari pasca revolusi menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan.²⁰

Dalam konteks tersebut, di tengah politik identitas yang menguat, fenomena perempuan, terutama gerakan feminisme ikut serta terlibat dalam proses rekonsiliasi dan transformasi politik Tunisia pasca revolusi merupakan suatu kebaruan yang dilakukan dalam gerakan feminisme di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Perempuan Tunisia berperan dalam mengakomodasi hak-hak dan suara perempuan Tunisia dengan masuk ke parlemen maupun terlibat dalam berbagai kasus dan isu-isu kesetaraan gender, baik mereka menjadi politisi, aktivis gender, kelompok feminis, ataupun berbagai profesi lainnya, yang pada dasarnya menyuarakan hak-hak perempuan dan memberikan sinyal positif terhadap arah

¹⁹ Wolf and Anne M, *Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda*, 1st ed. (Oxford University Press, 2017), 129-130.

²⁰ Chuchu Zhang, *Islamist Party Mobilization: Tunisia's Ennahda and Algeria's HMS Compared, 1989–2014*, 1st ed. (Springer Singapore; Palgrave Macmillan, 2020), 213.

perbaikan terkait situasi dan kondisi perempuan Tunisia post-Arab Spring. Selain itu, politik identitas yang menguat post-Arab Spring juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk politik, sosial, dan ekonomi Tunisia yang berubah pasca tumbangannya rezim Ben Ali. Keterlibatan partai An-Nahdhah dan kelompok feminis, serta politisi ulung yang berpengaruh juga menjadi faktor mengapa politik identitas menguat di Tunisia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan diatas, maka dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana arah baru gerakan feminisme Tunisia pada masa post-Arab Spring?
2. Bagaimana konstelasi politik identitas di Tunisia post-Arab Spring?
3. Mengapa politik identitas dan upaya gerakan kelompok feminisme menguat post-Arab Spring dalam persoalan politik Tunisia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah, melacak, dan memberikan perspektif yang baru dalam persoalan diskursus gerakan feminisme Tunisia kaitannya dengan politik Tunisia pos Arab Spring. Selain itu, menguatnya politik identitas di Tunisia pasca tumbangannya Ben Ali dari kekuasaannya juga menjadi poin penting yang dibahas

dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman dan kajian yang utuh dalam perdebatan akademik terkait gerakan feminisme Tunisia dan kaitannya dengan politik identitas di Tunisia yang terjadi pasca peristiwa Arab Spring. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dan akademik kepada para peneliti selanjutnya untuk lebih komprehensif dan mendalam untuk meneliti dan mengkaji terkait topik gerakan feminisme Tunisia dan politik identitas pos Arab Spring. Selain itu, penelitian ini juga terkandung bagaimana proses dan fenomena sosial yang terkait dengan gerakan sosial yang terjadi dalam lanskap masyarakat dan negara.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pelacakan terhadap berbagai literatur yang ada, terutama terkait gerakan feminisme Tunisia. Peneliti menemukan beberapa tema penelitian yang terkait dengan gerakan feminisme Tunisia, terutama pada masa sebelum, tengah terjadinya peristiwa Arab Spring maupun pasca peristiwa Arab Spring. Adapun penelitian yang membahas mengenai perempuan Tunisia modern, yakni penelitian yang ditulis oleh Amy Aisen Kallander yang berjudul *Women, Gender, and the Palace Households in Ottoman Tunisia*.²¹ Dalam bukunya tersebut, Kallander berupaya membahas bagaimana perdebatan mengenai diskursus feminisme-negara dan global. Di dalam penelitiannya, Kallander berusaha menelaah bagaimana potret perempuan urban, keluarga di wilayah pedalaman,

²¹ Amy Aisen Kallander, *Women, Gender, and the Palace Households in Ottoman Tunisia* (University of Texas Press, 2013).

dan keadilan dalam persoalan reproduksi. Beberapa kajian yang dilakukan Kallender, terutama mengenai konteks *fashion*, konsumsi, dan peran gender dalam lanskap Tunisia modern. Selanjutnya, ia juga berusaha mengupas topik terkait cinta dan seksual, yakni bagaimana keterbatasan perempuan Tunisia dan diskursus maskulinitas-heteroseksual. Untuk itu, penelitian Kallender dapat menjadi pijakan dan acuan awal untuk melihat bagaimana perempuan Tunisia modern dalam mengekspresikan dirinya dalam ruang-ruang publik.

Selanjutnya, penelitian lainnya yang membahas mengenai peran perempuan dalam kaitannya dengan peristiwa pos Arab Spring, yakni penelitian yang berjudul *State Feminism dan Perjuangan Wanita di Tunisia* yang ditulis oleh Mohd Irwan Syazli Saidin dan Nur Amira Alfitri.²² Penelitian ini mengungkap secara detail mengenai fenomena peristiwa Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang menjadi momentum dan membawa transformasi yang signifikan terutama dalam lanskap politik Tunisia. Di dalam penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa pasca revolusi Arab Spring 2011 menjadi awal baru pemerintah Tunisia dan secara bertahap mengadopsi gagasan utama terkait dengan feminisme negara. Sementara itu, dalam konteks tersebut menekankan pada peran pemerintah dalam melakukan tindakan afirmatif dalam mendukung hak-hak perempuan Tunisia. Secara garis besar, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana keterkaitan

²² Mohd Irwan Syazli Saidin dan Nur Amira Alfitri, 'State Feminism' dan Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011," *International Journal of Islamic Thought (IJIT)* 18 (December 2020): 54–64.

antara feminisme negara dan peran perjuangan perempuan Tunisia pos Arab Spring. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini yakni perempuan pasca revolusi Arab Spring mengalami lintasan baru dalam konteks kebebasan politik dan sosial. Bahkan, terjadi lonjakan yang cukup besar dalam peningkatan jumlah anggota parlemen yang didalamnya diisi oleh perempuan dan mereka memiliki peran penting dalam penyusunan konstitusi Tunisia yang baru dan didalamnya memuat pengakuan perlindungan hak-hak perempuan Tunisia melalui pasal 46 tahun 2014 dan penghargaan Nobel perdamaian pada tahun 2015.

Lebih lanjut, penelitian terkait peran perempuan pos Arab Spring juga dilakukan oleh Marwa Shalaby dan Valentine M. Moghadam yang berjudul *Empowering Women after the Arab Spring*.²³ Penelitian ini memuat beberapa topik penting mengenai keterlibatan dan peran perempuan dalam konteks politik pasca terjadinya revolusi Arab Spring. Beberapa kasus peran perempuan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah, seperti halnya Tunisia, Mesir, Lebanon, Yordania, dan beberapa negara lainnya juga menjadi topik pembahasan. Akan tetapi, jika membaca lebih detail terkait perempuan Tunisia, terutama dalam persoalan tantangan perempuan dalam partisipasi politik post-Arab Spring yang ditulis oleh Marwa Shalaby. Ia mengulas bagaimana pola partisipasi perempuan di seluruh dunia Arab yang mengalami transformasi yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Jika

²³ Marwa Shalaby dan Valentine M. Moghadam (eds.), *Empowering Women after the Arab Spring*, 1st ed., Comparative Feminist Studies (Palgrave Macmillan US, 2016).

sebelum terjadi Arab Spring, perempuan terlihat sebagai sosok yang pasif dan tertindas, serta membutuhkan penyelamatan. Akan tetapi, pola yang berbeda ditunjukkan pasca terjadi revolusi Arab Spring, dimana perempuan cenderung pro-aktif dan tangguh dalam berbagai kesempatan, termasuk upaya pemberontakan massal yang berusaha menjatuhkan rezim otokratis. Perempuan menyuarakan mengenai keadilan, kewarganegaraan setara, dan hak-hak dasar perempuan. Untuk itu, setelah berpuluh tahun mereka terpinggirkan dalam sosial dan politik, akhirnya mereka menciptakan ruang publik yang sah dalam menyuarakan keluhan dan hak-hak mereka dalam berperan aktif terkait proses politik.

Setelah melakukan pembacaan dan penelusuran terkait topik yang peneliti kaji yakni gerakan feminisme Tunisia dan politik identitas post-Arab Spring, peneliti akhirnya memberikan penilaian dan kesimpulan terkait hal tersebut. Kesimpulan dan klaim akademik beberapa penelitian mengenai gerakan feminisme masih sekadar formalitas belaka, artinya belum mengulas secara komprehensif aktivitas dan gerakan praksis mereka sehingga berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam lanskap politik Tunisia pos Arab Spring. Sementara, terkait politik identitas masih belum terlalu mengkaji bagaimana diskursus tersebut dalam lanskap politik Tunisia pos Arab Spring. Hal ini justru menjadi kajian penting untuk melihat bagaimana aktivitas politik identitas Tunisia dalam konteks modern. Sehingga terjadi kekosongan pembahasan politik identitas dalam proses politik Tunisia, terutama pasca tumbangannya presiden Ben Ali dan pasca terjadinya revolusi Arab Spring.

Tidak hanya itu, penelitian lainnya terkait rekonsiliasi politik Tunisia pada tahun 2011-2015 juga dikaji oleh Libasut Taqwa dan Hendra Kurniawan dalam artikel yang berjudul *Peran Partai Al-Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015*.²⁴ Penelitian ini menelaah bagaimana peran partai An-Nahdhah dalam proses rekonsiliasi politik Tunisia pada kurun waktu 2011-2015. Partai An-Nahdhah merupakan partai Islam yang memenangkan pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi Arab Spring dan memainkan peran penting dalam proses transisi politik. Selanjutnya, penelitian terkait konsolidasi demokrasi di Tunisia juga menjadi salah satu kajian penting untuk melihat bagaimana transisi politik Tunisia pos Arab Spring. Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Veryna Novemta Simatupang dan Arya Sandhiyuda berjudul *Analisis Faktor-faktor Utama dalam Konsolidasi Demokrasi di Tunisia Pasca Arab Spring 2011-2014*. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa demokrasi di Tunisia merupakan bukti upaya konsolidasi demokrasi oleh pemerintahan pos Arab Spring. Nilai-nilai demokrasi yang sukses terepresentasikan dalam terlaksananya pemilu Tunisia yang adil pada tahun 2011. Bahkan, pada masa itu adanya koalisi dan hubungan yang baik dengan kelompok oposisi, serta kebijakan pemerintah yang tidak bersifat otoriter. Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya demokrasi di Tunisia, yakni paradigma liberalisme melalui isu demokrasi dengan

²⁴ Libasut Taqwa and Hendra Kurniawan, "Peran Partai Al-Nahdhah Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 4, No. 1 (2017): 22–42.

ideologinya dan memberikan pengaruh pada budaya politik, dan konsep sekularisme pasif yang diusung oleh partai An-Nahdhah.

Selanjutnya, terkait keterlibatan perempuan dalam konstitusi baru Tunisia juga dapat dilacak dari penelitian yang dilakukan oleh Mounira M. Charrad dan Amira Zarrugh yang berjudul *Equal or complementary? Women in the new Tunisian Constitution after the Arab Spring*.²⁵ Dalam penelitiannya, Charrad berupaya mengkaji dan melacak bagaimana proses peristiwa Arab Spring telah membentuk politik baru yang mewakili adanya pergeseran dari politik atas ke bawah, terutama terkait kebijakan gender di Tunisia. Charrad berusaha menyoroti terkait wacana seputar kebijakan negara tentang gender yang dulunya terkesan dalam lingkup kelompok elit. Sementara belakangan ini dibentuk dan didorong oleh organisasi dan asosiasi rakyat. Penelitian ini menemukan fakta dan temuan baru, yakni pergeseran yang dihasilkan tersebut difasilitasi oleh munculnya ruang publik baru dan keterlibatan masyarakat sipil dalam jatuhnya rezim Zine El-Abidine Ben Ali.

Penelitian lainnya yang juga berfokus pada keterlibatan perempuan dalam revolusi Arab Spring adalah penelitian yang ditulis oleh Andrea Khalil yang berjudul *Tunisia's Women: Partners in Revolution*.²⁶ Khalil berupaya melihat secara mendalam terkait politik gender yang terepresentasikan dalam revolusi Tunisia dan

²⁵ Loes Debuysere, "'La Femme' Before and After the Tunisian Uprising: (Dis)Continuities in the Configuration of Women in the Truth Regime of 'Tunisianité,'" *Middle East Law and Governance* 8, No. 2–3 (November 28, 2016): 201–27.

²⁶ Andrea Khalil, "Tunisia's Women: Partners in Revolution," *The Journal of North African Studies* 19, No. 2 (March 15, 2014): 186–99.

masa transisi dari 14 Januari 2011 hingga pemilihan umum pada 23 Oktober 2011. Penelitian ini menemukan bahwa ada perubahan yang terjadi pra dan pasca revolusi, yakni dari ideologi negara-feminis ke aktivisme gender yang terdesentralisasi pada periode pasca revolusi. Aktivitas gender pasca terjadinya revolusi juga berusaha mengembalikan kembali keadilan prinsip-prinsip moral dasar tentang hak asasi manusia. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Pelin Gönül Sahin juga menarik untuk dikaji, dengan judul *Women's Liberties and Gender Equality in Tunisia: The Asthma of the Arab Spring?*. Penelitian Pelin tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan kesetaraan gender di Tunisia yang diimplementasikan oleh negara pada pra dan pasca revolusi Arab Spring, terutama mengacu pada konteks politik Tunisia modern. Peran perempuan dan aktor-aktor masyarakat sipil dalam masa transisi juga menjadi fokus penting dalam memahami dinamika perubahan hak dan kebebasan perempuan Tunisia.

Selain itu, Amel Grami juga menulis penelitian tentang kesetaraan gender dalam artikel jurnal yang berjudul "Gender Equality in Tunisia".²⁷ Dalam penelitiannya, Grami mengungkap tentang status perempuan Tunisia yang terperangkap dalam perang politik yang memperebutkan isu-isu lain, seperti halnya kolonialisme, nasionalisme, modernitas, dan identitas budaya Islam. Dalam hal ini, negara juga berupaya mendefinisikan kembali hak dan kewajiban bagi semua warga negara dengan mengambil keputusan untuk melakukan reformasi hukum keluarga. Selain itu,

²⁷ Grami, "Gender Equality in Tunisia.", 349.

penelitian Grami juga mengulas mengenai status perempuan Tunisia dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam persoalan kesetaraan gender di Tunisia.

Dengan demikian, dari beberapa literatur terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka saya berusaha mengamati dari perspektif lain yakni dengan mengulas dan mengkaji secara komprehensif terkait persoalan penelitian yang belum terlalu dibahas dan dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai gerakan feminisme Tunisia dan perdebatan akademik dalam persoalan tersebut, serta konteks menguatnya politik identitas dalam konteks pasca revolusi Arab Spring yang menjadi poin penting untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, terutama keterlibatan perempuan dalam lanskap politik Tunisia, yakni masuknya perempuan ke parlemen dan peran mereka dalam mempengaruhi ruang publik.

E. Kerangka Teoretis

Dalam konteks tentang gerakan feminisme dalam lanskap politik Tunisia, terutama pasca terjadinya peristiwa Arab Spring merupakan suatu usaha menganalisis suatu topik besar penelitian yang harus dilakukan dengan prosedur ilmiah yang komprehensif. Untuk itu, perlu adanya kerangka teori untuk mendukung dalam proses penelitian ini. Seperti apa yang telah peneliti bahas dalam kajian Pustaka, bahwa ada beberapa aspek yang dikaji dalam pembahasan penelitian ini, yakni terkait gerakan feminisme Tunisia pos Arab Spring dan politik identitas yang menguat pada momentum tersebut.

Peneliti menggunakan teori *political opportunity structures* atau dikenal dengan teori struktur kesempatan politik. Dalam buku *Theories of Political Protest and Social Movement: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis* disebutkan bahwa ada berbagai faktor yang memainkan peran penting dalam upaya cara pemilihan, status sosial, dan derajat disintegrasi sosial, baik secara individu maupun kolektif. Dalam hal ini, Eisinger menyatakan beberapa faktor yang disebut dengan struktur kesempatan politik, seperti halnya responsivitas pemerintah yang lebih atau kurang mempromosikan pencapaian tujuan individu, yakni meningkatkan terjadinya peluang keberhasilan kegiatan politik warga.²⁸ Sementara itu, tiga elemen penting dalam struktur kesempatan politik, yakni variabel lingkungan politik hanya disebut dengan struktur kesempatan politik jika berkaitan dengan tujuan individu. Oleh karena itu, untuk memastikan tujuan para aktor, maka perlu dipastikan secara empiris, kemudian baru diputuskan bahwa struktur kesempatan politik tersebut ada. Sementara, kedua yakni peluang sukses dari struktur kesempatan politik yaitu mampu didefinisikan secara objektif dengan sudut pandang dari pengamat. Ketiga, yakni untuk menentukan apakah faktor tertentu merupakan struktur kesempatan politik atau tidak, yakni seseorang harus membangun hubungan sebab akibat, yakni pertanyaan harus dijawab sejauh mana faktor mengubah probabilitas tujuan mampu tercapai.

²⁸ Karl-Dieter Opp, *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*, 1st ed. (Routledge, 2009), 37.

Lebih lanjut, menurut pandangan Eisinger, bahwa protes merupakan sebagian fungsi dari peluang politik. Dalam hal ini, ada dua model yang dipaparkan oleh Eisinger, yakni model linier dan curvilinear. Dalam model linier disebutkan bahwa protes merupakan bentuk dari *frustrated response*, jika struktur kesempatan politik rendah maka protes akan semakin tinggi, begitu sebaliknya, jika struktur kesempatan politik tinggi maka protes akan menurun. Maka, hal ini menyebabkan adanya suatu ekspektasi yang meningkat akan terjadinya permintaan individu pada politik.²⁹

Sementara dalam konteks gerakan feminisme dan politik identitas di Tunisia *post Arab Spring* dapat dibaca sebagai suatu konstruksi dan gerakan sosial yang berupaya melakukan protes dan akhirnya memunculkan peluang, serta adanya kesempatan politik untuk masuk ke parlemen dan berpartisipasi aktif dalam lanskap politik Tunisia. Artinya, perempuan memiliki celah dan kesempatan untuk menyuarakan hak-hak dan pendapatnya melalui kanal-kanal politik, sehingga hal tersebut mampu dimanfaatkan oleh para perempuan untuk berperan dan terlibat dalam politik.

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, maka perlu adanya pengamatan, eksplorasi data dan analisis yang mendalam untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dan bersifat komprehensif. Untuk itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih penting dalam perdebatan akademik dan dunia penelitian mengenai gerakan feminisme Tunisia dan politik identitas pasca terjadinya revolusi Arab Spring.

²⁹ Ibid, 163.

F. Metode Penelitian

Dalam tahap metode penelitian, pada dasarnya memuat beberapa hal fundamental terkait langkah-langkah, upaya dan prosedur, serta strategi yang digunakan dalam suatu penelitian. Untuk itu, saya melakukan beberapa langkah dan strategi untuk mendapatkan hasil dan temuan penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya berdasarkan prosedur penelitian. Langkah awal yang saya lakukan, yakni memetakan *research question*, kemudian melakukan eksplorasi dan mencari beberapa data terkait gerakan feminisme Tunisia pada revolusi Arab Spring dan kaitannya dengan politik identitas yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2015.

Dalam mendapatkan data yang otentik dan faktual atas apa yang terjadi dalam masa revolusi Arab Spring, saya telah membaca dan mengkaji beberapa kajian terkait gerakan feminisme Tunisia pada masa tersebut. Selain itu, terkait dengan data penelitian yang saya ambil, yakni menggunakan data yang terdapat dalam referensi primer terkait topik perempuan Tunisia, politik identitas, gerakan sosial, dan masyarakat Tunisia dalam konteks terjadinya revolusi Arab Spring. Adapun referensi sekunder yakni beberapa berita, situs website, informasi dari media sosial, baik Twitter, Instagram, dan Facebook yang memuat beberapa informasi penting untuk menunjang data dan literatur sehingga data yang didapat valid dan mampu menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tidak hanya buku-buku yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini. Akan tetapi, juga mengambil data-data dari beberapa jurnal dan laporan penelitian yang menjadi bahan

penunjang dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelaborasi data dan penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki kebaruan. Dalam menganalisis bagaimana transformasi gerakan feminisme dan politik identitas di Tunisia, peneliti menggunakan teori gerakan sosial. Tiga komponen utama dalam teori ini yakni, peluang politis (*political opportunity structure*), siklus penentangan (*cycle of contention*), dan pembingkaihan (*framing*). Selanjutnya, data-data yang sudah didapatkan, maka penulis olah dengan pendekatan *critical reading*. Ketika analisis data selesai, maka tahap selanjutnya yakni membaginya ke dalam beberapa variabel untuk memudahkan dalam menganalisis masalah dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Tahap terakhir, yakni menarasikan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan tahapan yang rigid dan komprehensif. Sehingga, hasil temuan penelitian mampu dibaca dan terepresentasikan dalam hasil penelitian yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah menguraikan penelitian ini, saya memetakan dan membagi kedalam beberapa bab. Selain itu, hal ini sebagai usaha dalam mendukung dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan diatas. Dalam hal ini, akan dibagi ke dalam lima bab yang digambarkan secara singkat sebagai berikut.

Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang

didalamnya memuat gerakan feminisme Tunisia dan politik identitas pasca Arab Spring.

Bab kedua mengulas tentang bagaimana gerakan feminisme Tunisia dalam proses politik Tunisia, terutama pasca peristiwa Arab Spring. Dalam bab ini juga dibahas mengenai relasi historis antara perempuan dan politik pada pra-Arab Spring, proses terjadinya Arab Spring, dan pasca Arab Spring, terutama pasca tumbangnya presiden Ben Ali.

Bab ketiga membahas tentang sejauh mana politik identitas dan upaya gerakan kelompok feminisme yang menguat dalam ruang publik dan politik Tunisia modern. Pada bab ini mengulas keterkaitan politik identitas dan arah baru gerakan feminisme yang mempengaruhi konstelasi politik Tunisia pasca Arab Spring.

Bab keempat memuat proses politik identitas yang menguat pasca revolusi Arab Spring, dimana erat kaitannya dengan kondisi masyarakat Tunisia pasca terjadinya Arab Spring pada tahun 2011 dan adanya gerakan sosial yang akan diteliti secara intensif menggunakan teori kesempatan politik. Hal itu pula membuat semakin menguatnya identitas politik identitas dalam konteks politik Tunisia modern.

Bab kelima, yakni penutup, didalamnya berisi kesimpulan dari analisis data dari penelitian ini dan saran-saran terkait kontribusi akademik untuk perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya terkait gerakan feminisme dan menguatnya politik identitas pasca Arab Spring berkecamuk di Tunisia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tunisia menjadi awal mula gerakan revolusi di Dunia Arab. Momentum Arab Spring menjadi *trigger* bagi arah baru politik Tunisia. Rezim Ben Ali yang berkuasa selama kurang lebih 30 tahun akhirnya runtuh. Momentum tersebut telah menjadi faktor perubahan politik bagi negara tersebut. Peran perempuan dan keterlibatan gerakan feminisme post-Arab Spring juga tidak dapat dinafikan. Pasalnya, mereka juga terlibat dalam mobilisasi massa dengan aksi demonstrasi selama meletusnya revolusi. Para perempuan Tunisia juga menggunakan jejaring media sosial dan berbagai upaya lain untuk ikut terlibat dalam proses revolusi.

Tidak hanya itu, para perempuan dan gerakan feminisme Tunisia pasca revolusi juga berupaya memperjuangkan hak-hak mereka, terutama terkait persoalan hukum keluarga dan kesetaraan gender. Mereka juga mulai terlibat dalam ruang politik dengan masuk ke parlemen. Dari situasi tersebut telah merepresentasikan bahwa feminisme di Tunisia telah berubah dari ideologi negara ke aktivisme gender. Apa yang dikemukakan oleh Amy Aisen Kallander bahwa gerakan feminisme di Tunisia pada sebelum Arab Spring disebut sebagai “state feminism”.¹²³ Lebih lanjut, pada masa Arab Spring, gerakan feminisme Tunisia mengalami perubahan

¹²³ Amy Aisen Kallander, *Tunisia's Modern Woman: Nation-Building and State Feminism in the Global 1960s*, The Global Middle East 17 (Cambridge University Press, 2021).

strategi gerakan, yakni apa yang Joyce Outshoorn dan Johanna Kantola¹²⁴ kemukakan tentang adanya perubahan yang lebih agresif atas isu-isu politik pemerintahan. Moghadam dan Shalaby menyebut Gerakan feminisme Tunisia lebih pada penguatan kesetaraan dan aktivisme gender. Sedangkan, pada masa post-Arab Spring peneliti lebih menyebut kecenderungan arah baru gerakan feminisme Tunisia sebagai feminisme partisipatif, yakni upaya partisipatif para perempuan untuk ikut terlibat dalam merespon dan mengkritik kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, gender, dan hak-hak perempuan maupun berpartisipasi dalam berbagai kebijakan pemerintah, terutama pada masa transisi.

Politik identitas juga menjadi persoalan penting dalam melihat konteks sosial-politik di Tunisia. Pasalnya, sejak masa pemerintahan Habib Bourguiba, kontestasi antara kubu Islamis dan sekuler tidak dapat dihindarkan. Kedua kubu tersebut saling berbenturan satu sama lain. Apalagi Tunisia juga menerapkan sistem pemerintahan sekuler, sehingga entitas Islam sulit mendapatkan tempat dalam lanskap keagamaan di Tunisia. Selain itu, demokrasi dan transisi politik Tunisia juga menjadi persoalan baru pasca revolusi. Berbagai tantangan dan kendala dalam proses pembentukan pemerintahan baru. Kelompok Islamis diwakili oleh partai Ennahda dan kelompok sekuler diwakili oleh partai *Congrès pour la République* (CPR). Keduanya saling berkontestasi dan mengkompromikan situasi politik pasca revolusi. Selain itu, partai Ennahda sebagai partai Islamis juga berupaya mengakomodasi

¹²⁴ Joyce Outshoorn and Johanna Kantola, *Changing State Feminism*, First Edition, 2007.

perempuan dalam berbagai kebijakannya. termasuk banyak perempuan yang masuk ke parlemen dan tergabung di Majelis Konstituante. Partai Ennahda juga lebih efektif memobilisasi dan cenderung bersifat inklusif terhadap perempuan pasca revolusi.

Lebih lanjut, politik identitas juga menguat pasca penggulingan rezim Ben Ali, terutama kontestasi antara kelompok Islamis dan sekularis. Partai Ennahda berupaya mengambil kesempatan politik untuk masuk ke ruang politik, terutama dalam proses transisi pasca jatuhnya Ben Ali. Sementara itu, gerakan feminisme dan perempuan Tunisia juga tengah bernegosiasi dalam memperjuangkan isu gender dan ikut terlibat dalam proses transisi, terutama dengan adanya perempuan yang masuk ke parlemen. Hal ini menjadi momentum penting bagi perempuan Tunisia untuk terlibat aktif dalam ruang publik dan politik Tunisia post-Arab Spring. Tidak hanya itu, mobilisasi gerakan perempuan Tunisia juga tidak dapat dinafikan dalam proses Arab Spring di Tunisia, mereka juga turun ke jalanan dan menyuarakan hak-hak mereka ke ruang publik, serta menuntut terjadinya perubahan bagi masa depan perempuan Tunisia dalam perundang-undangan dengan ikut serta dalam penyusunan konstitusi negara.

B. Saran

Beberapa ulasan dan penjelasan penelitian ini pada dasarnya bukan akhir dari pembahasan. Namun, persoalan ini harus diteliti dan diperdalam lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang otentik dan komprehensif. Beberapa literatur dan referensi yang sesuai dengan penelitian yang beragam juga akan menambah

perspektif dan pembahasan yang luas, terutama mengenai gerakan feminisme Tunisia dan identitas post-Arab Spring yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, permasalahan penelitian yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini pada dasarnya sangat luas dan beragam, tetapi peneliti berusaha memfokuskan pada pembahasan gerakan feminisme dan politik identitas di Tunisia post-Arab Spring, terutama pada kurun tahun 2011-2015.. Karena keterbatasan data-data dan eksplorasi peneliti, maka peneliti masih belum mengkaji lebih jauh terkait persoalan di Tunisia yang kompleks. Tidak hanya itu, keterbatasan waktu dan beberapa faktor juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan penelitian ini.

Riset selanjutnya terkait tema dan problem penelitian yang dibahas dalam penelitian ini harus terus dilakukan untuk perbaikan penelitian ini. Terlebih mengenai dinamika politik post-Arab Spring pasca tahun 2015, dimana berbagai gejolak politik Tunisia juga terus dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran dan telaah yang komprehensif membahas tentang permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, persoalan gerakan feminisme dan politik identitas yang dinamis, maka perlu adanya usaha memperbarui referensi dan data-data, serta situasi dan kondisi yang terjadi dalam lanskap politik Tunisia mutakhir. Untuk itu, peneliti mengharapkan usaha penyempurnaan atas keterbatasan tesis dan menjadi bahan perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Leaders. “Amna Guellali: Parcours d’une combattante.” diakses pada 7 Agustus 2022. <https://www.leaders.com.tn/article/19278-amna-guellali-parcours-d-une-combattante>.
- Arfaoui, Khedija. “The Development of the Feminist Movement in Tunisia 1920s-2000s.” *The International Journal of the Humanities: Annual Review* 4, No. 8 (2007): 53–60.
- WISE. “Aya Chebbi.” diakses pada 29 Juli 2022. <https://www.wise-qatar.org/biography/aya-chebbi/>.
- Baker, Veronica. “The Role of Civil Society in the Tunisian Democratic Transition.” diakses pada 20 Desember 2021. https://scholar.colorado.edu/concern/undergraduate_honors_theses/jw827c25s.
- Charrad, Mounira. *States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. 1st ed., 2001.
- Charrad, Rita Stephan and Mounira M. *Women Rising: In and Beyond the Arab Spring*. New York University Press, 2020.
- CIDOB. “CIDOB - Women’s Liberties and Gender Equality in Tunisia: The Asthma of the Arab Spring?” diakses pada 1 Desember 2021. http://www.cidob.org/en/publications/publication_series/monographs/monographs/women_s_liberties_and_gender_equality_in_tunisia_the_asthma_of_the_arab_spring.
- Cooke, Miriam. “Arab Women Arab Wars.” *Cultural Critique*, No. 29 (1994): 5–29.

- Sommet de la Francophonie. “Dalenda Largueche.” diakses pada 7 Agustus 2022. <https://somet-francophonie.challenges.fr/speakers/dalenda-largueche/>.
- Debuysere, Loes. “‘La Femme’ Before and After the Tunisian Uprising: (Dis)Continuities in the Configuration of Women in the Truth Regime of ‘Tunisianité.’” *Middle East Law and Governance* 8, No. 2–3 (November 28, 2016): 201–27.
- Framing Post-Third-Worldist Culture*. diakses pada 27 Desember 2021. https://books.google.com/books/about/Framing_Post_third_worldist_Culture.html?hl=id&id=hTKloAEACAAJ.
- Gabsi, Zouhir. “Tunisia’s Youth: Awakened Identity and Challenges Post-Arab Spring.” *British Journal of Middle Eastern Studies*, September 9, 2017. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13530194.2017.1371000>.
- Gana, Nouri. *The Making of the Tunisian Revolution: Contexts, Architects, Prospects*. Edinburgh University Press, 2013.
- Garelli, Glenda, and Martina Tazzioli. *Tunisia as a Revolutionized Space of Migration*. New York: Palgrave Macmillan US, 2017.
- Ghafur, Muhammad Fakhry. “Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya.” *Jurnal Penelitian Politik* 11, No. 2 (April 11, 2016): 16.
- Ghannouchi, Rached. “From Political Islam to Muslim Democracy: The Ennahda Party and the Future of Tunisia.” *Foreign Affairs* 95, No. 5 (2016): 58–67.
- Grami, Amel. “Gender Equality in Tunisia.” *British Journal of Middle Eastern Studies* 35, No. 3 (2008): 349–61.

- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*, 2018.
- Henneberg, Sabina. “Before and After Bin‘Ali: Comparing Two Attempts at Political Liberalization in Tunisia.” *Review of Middle East Studies* 53, No. 2 (2019): 306–20.
- Ibad, Faizul, and Abdul Muta’ali. “Identitas Dan Kebijakan Luar Negeri: Konstruksi Identitas Dalam Kebijakan Luar Negeri Tunisia Pasca Revolusi.” *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 8, No. 1 (January 15, 2021).
- Joseph, Suad. “Gender and Citizenship in Middle Eastern States.” *Middle East Report*, no. 198 (1996): 4–10.
- Jourchi, Salaheddine. “The State and Identity: The Relationship between Religion and Politics — Tunisia as an Example.” *Contemporary Arab Affairs* 6, No. 3 (2013): 358–75.
- . “The State and Identity: The Relationship between Religion and Politics — Tunisia as an Example.” *Contemporary Arab Affairs* 6, No. 3 (2013): 358–75.
- Kallander, Amy Aisen. *Women, Gender, and the Palace Households in Ottoman Tunisia*. University of Texas Press, 2013.
- Kerrou, Mohamed. “Challenges and Stakes of State and Societal Resilience in Tunisia.” Istituto Affari Internazionali (IAI), 2017.
- Khalil, Andrea. “Tunisia’s Women: Partners in Revolution.” *The Journal of North African Studies* 19, No. 2 (March 15, 2014): 186–99.

- Khamis, Sahar. "The Arab 'Feminist' Spring?" *Feminist Studies* 37, No. 3 (2011): 692–95.
- Khedher, Rayed. "Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal Status." *Journal of International Women's Studies* 18, No. 4 (2017): 30.
- Espace Manager. "La Jeune Volontaire Tunisienne Hayfa Sdiri parmi les 100 femmes les plus influentes au monde." Accessed August 7, 2022. <https://www.espacemanager.com/la-jeune-volontaire-tunisienne-hayfa-sdiri-parmi-les-100-femmes-les-plus-influentes-au-monde.html>.
- Lisa, Anderson. *Demystifying the Arab Spring*, diakses pada 21 Oktober 2021.
- Lynch, Marc. "Tunisia's New al-Nahda." *Foreign Policy* (blog). diakses pada 30 Mei 2022. <https://foreignpolicy.com/2011/06/29/tunisi-as-new-al-nahda/>.
- Mabrouk, Mehdi. *Tunisia: The Radicalisation of Religious Policy. Islamist Radicalisation in North Africa*. Routledge, 2012.
- Mansouri, Fethi. "Youth and Political Engagement in Post-Revolution Tunisia." *British Journal of Middle Eastern Studies*, May 15, 2020, 1–17.
- Melucci, Alberto. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. 1st ed. Cambridge University Press, 1996.
- "Middle East Studies Center." diakses pada 10 Agustus 2022. <https://middleeaststudies.duke.edu/>.
- Miller, Laurel E., Jeffrey Martini, F. Stephen Larrabee, Angel Rabasa, Stephanie Pezard, Julie E. Taylor, and Tewodaj Mengistu. "The

Regime Transition in Tunisia and Emerging Challenges.” In *Democratization in the Arab World*, 57–78. Prospects and Lessons from Around the Globe. RAND Corporation, 2012.

Moghadam, Valentine M. “Democratization and Women's Political Leadership in North Africa.” *Journal of International Affairs* 68, no. 1 (2014): 59–78.

———. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder, CO: Lynne Rienner Pub, 1993.

Mohamed, Eid, and Dalia Fahmy. *Arab Spring: Modernity, Identity and Change*. 1st ed. 2020. Critical Political Theory and Radical Practice. Springer International Publishing;Palgrave Macmillan, 2020.

Mohd Irwan Syazli Saidin, and Nur Amira Alfitri. “‘State Feminism’ dan Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011.” *International Journal of Islamic Thought (IJIT)* 18 (December 2020): 54–64.

———. “‘State Feminism’ dan Perjuangan Wanita Di Tunisia Pasca Arab Spring 2011.” *International Journal of Islamic Thought (IJIT)* 18 (December 2020): 54–64.

Olimat, Muhamad. *Handbook of Arab Women and Arab Spring : Challenges and Opportunities*. Routledge International Handbooks. Routledge, 2014.

Opp, Karl-Dieter. *Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis*. 1st ed. Routledge, 2009.

Outshoorn, Joyce, and Johanna Kantola. *Changing State Feminism*. First Edition., 2007.

- Özcan, Sevinc Alkan. “The Role of Political Islam in Tunisia’s Democratization Process: Towards a New Pattern of Secularization?” *Insight Turkey* 20, No. 1 (2018): 209–26.
- Turess. “Parcours d’une Vie.” diakses pada 29 Juli 2022. <https://www.turess.com/fr/lapresse/155361>.
- Pickard, Duncan. “Challenges to Legitimate Governance in Post-Revolution Tunisia.” *The Journal of North African Studies*, December 15, 2011. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629387.2011.639563>.
- Poulis, Sargon S. “The Post-Arab Spring Geopolitical Instability And Its Effects On Middle East And North Africa.” Fort Hays State University, 2015. <https://scholars.fhsu.edu/theses/50>.
- Preysing (auth.), Domenica. *Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011–2013): How the Past Shapes the Future*. 1st ed. Politik Und Gesellschaft Des Nahen Ostens. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2016.
- “Radhia Nasraoui « Débarrassés Du Dictateur, Mais Pas Encore de La Dictature » | L’Humanité.” diakses pada 7 Agustus 2022. https://www.humanite.fr/20_01_2011-radhia-nasraoui-%C2%AB-d%C3%A9barrass%C3%A9s-du-dictateur-mais-pas-encore-de-la-dictature-%C2%BB-462964.
- Ritter, Daniel. *The Iron Cage of Liberalism: International Politics and Unarmed Revolutions in the Middle East and North Africa. The Iron Cage of Liberalism*. Oxford University Press. Accessed May 30, 2022. <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199658329.001.0001/acprof-9780199658329>.

- Sadiqi (eds.), Fatima. *Women's Movements in Post-"Arab Spring" North Africa*. 1st ed. Comparative Feminist Studies. Palgrave Macmillan US, 2016.
- Sahide, Ahmad, Syamsul Hadi, Siti Muti'ah Setiawati, and Bambang Cipto. "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, No. 2 (2016): 118–29.
- Shalaby, Marwa, and Valentine M. Moghadam (eds.). *Empowering Women after the Arab Spring*. 1st ed. Comparative Feminist Studies. Palgrave Macmillan US, 2016.
- Simatupang, Dhea Veryna Novemta, and Arya Sandhiyudha As. "Analisis Faktor-Faktor Utama dalam Konsolidasi Demokrasi Di Tunisia Paska Arab Spring (Tahun 2011 - 2014)." *Balcony* 2, No. 1 (February 23, 2018): 55–66.
- Stolley, Kathy S. *The Basics of Sociology*. Basics of the Social Sciences. Greenwood Press, 2005.
- Sukandi, Ahmad. "Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1957-1987)." *ASAS* 8, No. 2 (December 13, 2016).
- Tackett, Carolyn. "Tunisian Activist Emna Mizouni Joins Access Now Board." *Access Now* (blog), July 26, 2019. <https://www.accessnow.org/tunisian-activist-emna-mizouni-joins-access-now-board/>.
- Taqwa, Libasut, and Hendra Kurniawan. "Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 4, No. 1 (2017): 22–42.

Tarrow, Sidney G. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. 3rd ed. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge University Press, 2011.

Teti, Andrea, Pamela Abbott, and Francesco Cavatorta (auth.). *The Arab Uprisings in Egypt, Jordan and Tunisia: Social, Political and Economic Transformations*. 1st ed. Reform and Transition in the Mediterranean. Palgrave Macmillan, 2018.

“The Muslim World After 9/11 on JSTOR.” diakses pada 30 Mei 2022.

Touaf, Larbi, Soumia Boutkhill, and Chourouq Nasri, eds. *North African Women after the Arab Spring*. Cham: Springer International Publishing, 2017.

———, eds. *North African Women after the Arab Spring*. Cham: Springer International Publishing, 2017.

Umar, Ahmad R. Mardhatillah, Arief Bakhtiar Darmawan, Faella Sufa Sufa, and Gebyar Lintang Ndadari. “Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena ‘Arab Spring’ Dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 18, No. 2 (September 22, 2016): 114–29. <https://doi.org/10.22146/jsp.13130>.

Van Hamme, Gilles, Alia Gana, and Maher Ben Rebbah. “Social and Socio-Territorial Electoral Base of Political Parties in Post-Revolutionary Tunisia.” *The Journal of North African Studies* 19, no. 5 (October 20, 2014): 751–69.

Wolf, and Anne M. *Political Islam in Tunisia : The History of Ennahda*. 1st ed. Oxford University Press, 2017.

———. *Political Islam in Tunisia : The History of Ennahda*. 1st ed. Oxford University Press, 2017.

- Georgetown Institute of Women Peace and Security. "Women's Rights Before and After the Revolution." Accessed March 21, 2022. <https://giwps.georgetown.edu/resource/womens-rights-before-and-after-the-revolution/>.
- Yacoubi, Imen. "Sovereignty from Below: State Feminism and Politics of Women Against Women in Tunisia." *The Arab Studies Journal* 24, No. 1 (2016): 254–74.
- Yasmine, Shafira Elnanda. "Arab Spring: Islam dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 28, No. 2 (2015): 106–13.
- York, Jillian C. "In Memory of Lina Ben Mhenni, Tunisian Free Expression Activist and Revolutionary." Electronic Frontier Foundation, January 27, 2020. <https://www.eff.org/it/deeplinks/2020/01/memory-lina-ben-mhenni-tunisian-free-expression-activist-and-revolutionary>.
- Yumpu.com. "Youth Work in Tunisia after the Revolution - EuroMed Youth ...". yumpu.com. diakses pada 21 Maret 2022. <https://www.yumpu.com/en/document/view/36096780/youth-work-in-tunisia-after-the-revolution-euromed-youth->.
- Zhang, Chuchu. *Islamist Party Mobilization: Tunisia's Ennahda and Algeria's HMS Compared, 1989–2014*. 1st ed. Springer Singapore; Palgrave Macmillan, 2020.
- . *Islamist Party Mobilization: Tunisia's Ennahda and Algeria's HMS Compared, 1989–2014*. 1st ed. Springer Singapore; Palgrave Macmillan, 2020.
- "الطرف منتديات - المزغني سمر التونسية عربية روائية أصغر". diakses pada 7 Agustus 2022. <http://www.altaraf.com/vb/showthread.php?t=12476>.